

Analisis Tren Belanja Pertahanan dalam Memberikan Dampak terhadap Kemandirian Industri Pertahanan

Mohadib^{1*} ; Andriansyah²

Universitas Pamulang^{1*}

Universitas Muhammadiyah Jakarta²

dosen01299@unpam.ac.id^{1*}; andriansyah@umj.ac.id²

Received 01 Maret 2024 | Revised 20 Maret 2024 | Accepted 29 Maret 2024

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren belanja pertahanan dan dampaknya terhadap kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis dokumen atau *desk research*. Hasil analisis menunjukkan bahwa tren belanja pertahanan Indonesia, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi positif, ancaman keamanan, dan komitmen pemerintah untuk kemandirian industri pertahanan, mengalami fluktuasi dalam periode 2019-2024. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan 2024, anggaran pertahanan tetap signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pertahanan nasional. Tren belanja pertahanan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian industri pertahanan. Kritik melibatkan kurangnya transfer teknologi, pesanan terbatas, dan dependensi pada impor alutsista. Kemandirian memerlukan *political will* dan perubahan kebijakan untuk perkembangan jangka panjang. Dukungan penuh pemerintah, baik dalam anggaran maupun kebijakan, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian yang diinginkan dan menjawab dinamika global.

Kata Kunci: Belanja Pertahanan; Kemandirian; Industri Pertahanan Indonesia

Abstract

This research aims to analyze defense spending trends and their impact on the self-sufficiency of the defense industry in Indonesia. The article adopts a qualitative approach based on document analysis or desk research. The results of the analysis indicate that Indonesia's defense spending trends, influenced by positive economic growth, security threats, and the government's commitment to defense industry self-sufficiency, have fluctuated in the period 2019-2024. Despite decreases in 2023 and 2024, defense budgets remain significant, reflecting the government's commitment to national defense. However, defense spending trends have not significantly impacted the self-sufficiency of the defense industry. Criticisms involve insufficient technology transfer, limited orders, and dependence on imported defense equipment. Achieving self-sufficiency requires political will and policy changes for long-term development. Full government support, both in budgetary allocations and policies, is crucial to attaining the desired self-sufficiency and addressing global dynamics.

Keywords: Defense Spending; Self-Sufficiency; Indonesian Defense Industry

PENDAHULUAN

Industri pertahanan memegang peran krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara. Salah satu instrumen utama dalam mengoptimalkan komponen pertahanan dan merangsang pertumbuhan industri pertahanan adalah belanja pertahanan. Belanja pertahanan menjadi landasan

kebijakan strategis yang tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara, tetapi juga memainkan peran kunci dalam memajukan sektor industri pertahanan. Meskipun rincian spesifik terkait belanja pertahanan sering kali dijaga sebagai informasi rahasia atau terbatas demi keamanan nasional, analisis terfokus pada pola umum kebijakan belanja pertahanan yang meliputi tren dalam alokasi anggaran pertahanan, guna memberikan gambaran yang signifikan tentang pengaruhnya terhadap kemandirian industri pertahanan. Dalam banyak kasus, belanja pertahanan mencakup alokasi dana yang substansial untuk penelitian dan pengembangan, pembelian peralatan militer, serta investasi dalam infrastruktur pertahanan. Semua ini berkontribusi langsung pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya pertahanan luar negeri sesuai dengan amanat konstitusi.

Kemandirian industri pertahanan merupakan suatu kondisi di mana suatu negara memiliki kemampuan untuk memproduksi, memelihara, dan memodernisasi peralatan pertahanannya tanpa harus bergantung secara signifikan pada sumber luar negeri. Hal tersebut senada dengan upaya pemerintah terkait dengan sumber pembiayaan, setidaknya ada empat terobosan model pembiayaan yang diusahakan oleh Menhan Prabowo Subianto atas arahan Presiden Joko Widodo. Terobosan ini dilakukan untuk memenuhi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Indonesia yang sudah tua dan usang. Terobosan tersebut, (Wibowo, Fx. Pudjo, Gregorius Widiyanto, 2019) antara lain: 1) Terobosan pertama merupakan kontrak pengadaan jangka panjang 2044 yang dituntaskan antara tahun 2020-2024 untuk memastikan kesinambungan program modernisasi, serta memperbesar peluang investasi pertahanan ke Indonesia; 2) Terobosan kedua, setiap kontrak pengadaan dilengkapi dengan prasyarat investasi pertahanan untuk memastikan adanya transfer teknologi dan aliran kapital ke Industri Pertahanan Indonesia; 3) Terobosan ketiga, semua pengadaan sistem persenjataan dilakukan dengan pendekatan daur hidup untuk memastikan adanya kesinambungan pemeliharaan, perawatan, dan peningkatan teknologi senjata selama masa pakai operasional sistem persenjataan. Pendekatan daur hidup ini akan dilakukan dengan mengharuskan produsen senjata untuk membuat fasilitas perawatan dan pemeliharaan senjata di Indonesia bekerja sama dengan Industri Pertahanan Nasional; dan 4) Terobosan keempat, sejak awal pembahasan, kontrak pengadaan dijaga dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas oleh tim gabungan dari BPKP, Kejaksaan, dan BPK untuk memastikan penerapan tata pemerintahan yang baik.

Kebijakan strategi belanja pertahanan, bukanlah hal baru. Upaya untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan telah menjadi fokus utama dari kebijakan pertahanan nasional. Secara historis, upaya kemandirian industri pertahanan ini berkaitan situasi ancaman terhadap pertahanan negara sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks dan dinamis. Ancaman global seperti perang dan konflik, serangan siber, terorisme, ancaman nuklir, serta keamanan maritim, semakin memperumit keadaan dan menuntut negara untuk memiliki industri pertahanan yang tangguh dan mandiri, guna menghadapi berbagai ancaman serta memastikan stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Industri pertahanan merupakan solusi untuk keperluan pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF) di lingkungan TNI dan sekaligus sebagai reaksi atas trauma yang menjadi pengalaman pahit akibat embargo militer pada dekade 90-an (Wibowo, 2023). Embargo militer yang terjadi di masa lalu telah menghambat kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan peralatan militer yang dibeli dari negara-negara Barat. Pengalaman traumatis akibat embargo tersebut telah memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia, yang kini semakin memahami betapa pentingnya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap produk-produk luar negeri.

Pembiayaan belanja alutsista, sebagai bagian dari pembangunan postur militer yang ideal telah menjadi salah satu agenda penting di bidang pertahanan. Upaya tersebut diimplementasikan pemerintah melalui kebijakan *Minimum Essential Forces* (MEF) yang mulai dilaksanakan sejak 2010 dan ditargetkan rampung pada 2024 (Budiman, A., A. I. Nugroho, 2021). Dukungan anggaran yang berkelanjutan menjadi faktor penting, mengingat pemenuhan alutsista TNI masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum komponen utama pertahanan negara.

Industri pertahanan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dinilai belum optimal. Beberapa kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan. Namun, untuk beberapa jenis alutsista strategis seperti: pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV), dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri. Penguasaan teknologi kunci,

kemampuan integrasi sistem dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alpalhankam. Dengan demikian industri pertahanan dapat meningkatkan daya saing internasional sekaligus menjadi bagian dari global *supply chain*.

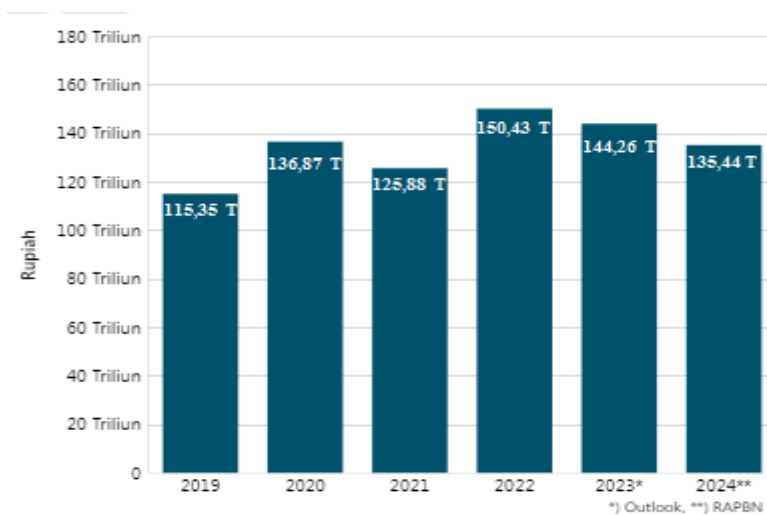
Pertahanan suatu negara merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Untuk mendukung efektivitas pertahanan, alokasi anggaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesiapan dan modernisasi alat-alat pertahanan. Pada tahun-tahun terakhir, Indonesia mengalami tren perubahan dalam alokasi anggaran pertahanan, yang secara signifikan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pemerintah dan kondisi geopolitik global.

Negara dengan Industri pertahanan yang maju juga didukung dan memiliki anggaran pertahanan yang besar, dan idealnya 20-30 persen anggaran pertahanan di alokasikan untuk industri pertahanan. (Karim, 2020). Namun sayangnya dukungan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data (SIPRI, 2020), belanja pertahanan Indonesia sebesar USD7,7 miliar atau 0,67 persen dari GDP pada tahun 2019. Atas belanja pertahanan tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat 27 dunia.



Gambar 1. Empat Puluh Negara dengan Belanja Pertahanan Terbesar di Dunia Tahun 2019
Sumber: (SIPRI., 2020), diolah

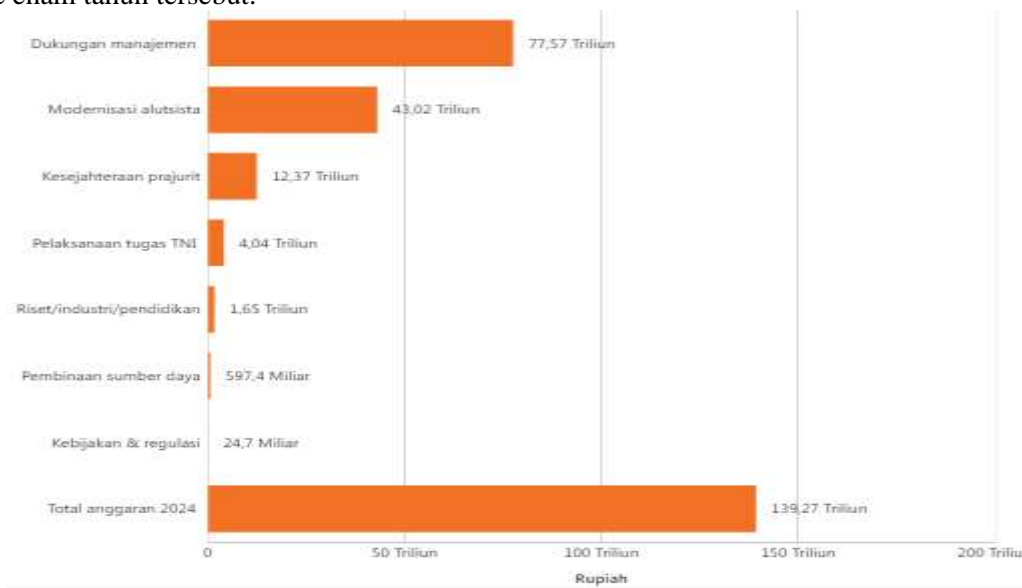
Berdasarkan kondisi latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mendiskusikan tentang tren belanja pertahanan RI, dimulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan pertahanan global, kemudian membandingkan anggaran belanja pertahan dengan negara tetangga, selanjutnya menganalisis kondisi belanja pertahanan Indonesia dalam memberikan dampak terhadap Industri Pertahanan.



Gambar 2. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia (2019-2024*)
Sumber : (Annur, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut memberikan gambaran anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Angka tersebut dinyatakan dalam triliun Rupiah. Anggaran tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp150,44 triliun, sedangkan anggaran terendah tercatat pada

tahun 2019 sebesar Rp115,35 triliun. Tabel ini mencerminkan perubahan alokasi anggaran selama periode enam tahun tersebut.



Gambar 3. Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN 2024 (2023)*

Sumber : (Santika, 2024)

Berdasarkan gambar tersebut memperinci alokasi anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2024, dengan rincian pos-pos pengeluaran. Alokasi terbesar dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp77,56 triliun, diikuti oleh modernisasi alutsista dan sarpras pertahanan sebesar Rp43,01 triliun. Terdapat penurunan alokasi anggaran pertahanan pada tahun 2024 sebesar 6.11% dibandingkan dengan outlook 2023. Meskipun demikian, prioritas pengeluaran terfokus pada dukungan manajemen dan modernisasi alutsista, yang mencerminkan upaya meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Tabel ini memberikan pandangan mendalam tentang prioritas dan fokus belanja Kementerian Pertahanan pada tahun tersebut. Data ini juga mengindikasikan adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI, peningkatan perumahan dinas, dan penguatan pertahanan di perbatasan dan pulau terluar. Selain itu, pembangunan industri pertahanan juga menjadi fokus untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan Alutsista.



Gambar 4. Tren Belanja Kementerian Pertahanan 2020-2023

Sumber : (Muhammad Ridwan, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan tren belanja Kementerian Pertahanan dari tahun 2020 hingga kuartal III/2023. Pagu belanja dan realisasi belanja dicantumkan dalam triliun Rupiah. Data pada kuartal III/2023 menunjukkan realisasi belanja sebesar Rp1,76 triliun. Tabel ini mencerminkan perubahan tren belanja dan realisasi belanja Kementerian Pertahanan selama periode tersebut. Tren belanja pertahanan yang cenderung naik sejak 2019 sejalan dengan data SIPRI yang mencatat kenaikan

belanja militer. Peningkatan anggaran tersebut juga diikuti oleh lonjakan pinjaman luar negeri, menunjukkan adanya strategi pemerintah dalam memperbarui dan meningkatkan alutsista.

Salah satu kebijakan terkait dengan alutsista adalah kebijakan pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut diamanatkan kepada BUMN industri pertahanan menjadi lead integrator pembangunan alutsista. Hingga tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 110 industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS. Saat ini, industri pertahanan Indonesia telah mampu membuat beberapa alat peralihan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), diantaranya adalah Anoa dari PT. Pindad, CN-235 dan NC212 dari PT. DI, Kapal Patroli Cepat 28 m, Kapal KCR 60 m, Kapal Perusak kawal Rudal (PKR), Kapal Landing Platform Dock (LPD) dari PT. PAL. Sejalan dengan (Sudirman et al., 2023) industri pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat yang bersamaan, negara dituntut untuk mengejar ketertinggalan teknologi alutsista dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.

Namun masih terdapat kendala pada industri pertahanan Indonesia yaitu terbatasnya infrastruktur dasar industri pertahanan dalam negeri dan rendahnya investasi dalam pengembangan riset ilmu untuk menunjang industri pertahanan. Industri pertahanan belum dapat memenuhi permintaan dari instansi pemerintah karena tidak menerapkan teknologi tercanggih. Hal tersebut terbukti dari Indonesia masih melakukan impor seperti fregat, corvet dan kapal selam dari Belanda, Inggris dan Jerman, tank tempur dari Jerman, serta masih mengimpor semua pesawat tempurnya yaitu jet tempur F-16 dan F-5 dari Amerika Serikat, Sukhoi dari Rusia, pesawat patroli maritim dan transportasi dari Amerika Serikat dan Spanyol, serta pesawat latihan dari Korea Selatan.

Pada pasal 43 ayat (3) UU 16/2012 mengamanatkan bahwa setiap pembelian alpalhankam dari luar negeri harus melibatkan partisipasi industri pertahanan dalam bentuk Kandungan Lokal dan *Offset* (KLO) maupun transfer teknologi (ToT), yang merupakan mata rantai penting untuk membangun kemampuan industri pertahanan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Amanat UU tersebut benar-benar diterapkan agar industri pertahanan dapat berkembang secara mandiri dan menjadi bagian penting dari mata rantai pasok (*Global supply chain*) alpalhankam.

Peran pemerintah dalam mendorong industri pertahanan menjadi kunci, seiring dengan dukungan APBN untuk pemenuhan kebutuhan alat tempur dan teknologi terkini. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa adanya utang luar negeri yang melesat juga menjadi pertimbangan kritis dalam analisis keberlanjutan dan dampak terhadap kemandirian industri pertahanan.

Meskipun terdapat upaya dan langkah-langkah positif dalam mendukung industri pertahanan, perlu diarahkan pada kebutuhan untuk lebih proaktif dalam mengatasi kendala infrastruktur dan peningkatan investasi riset. Dukungan penuh pemerintah, bukan hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan riset, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian yang diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren belanja pertahanan dan dampaknya terhadap kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Dalam menjalankan analisis tersebut, penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor kunci, mengevaluasi alokasi anggaran, dan mengkritisi tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, sebagai penutup, perlu langkah-langkah konkret dan integratif dari pemerintah untuk memastikan kemandirian industri pertahanan dapat dicapai dalam jangka panjang. Keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

METODE

Dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis dokumen atau *desk research* (Travis, 2016). *Desk research* merupakan nama lain untuk penelitian sekunder. Peran penulis sebagai peneliti yang melakukan *desk research* adalah untuk meninjau temuan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang bidang tersebut. Penggunaan metode kualitatif akan berorientasi pada pencarian makna di balik realitas yang bersifat empiris dari realitas sosial yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan.

Data yang digunakan melalui tinjauan pustaka meliputi informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, berita, dan laporan terpercaya yang berkaitan dengan kasus penelitian penulis.

HASIL dan PEMBAHASAN

Anggaran dan Tren Belanja Pertahanan Indonesia

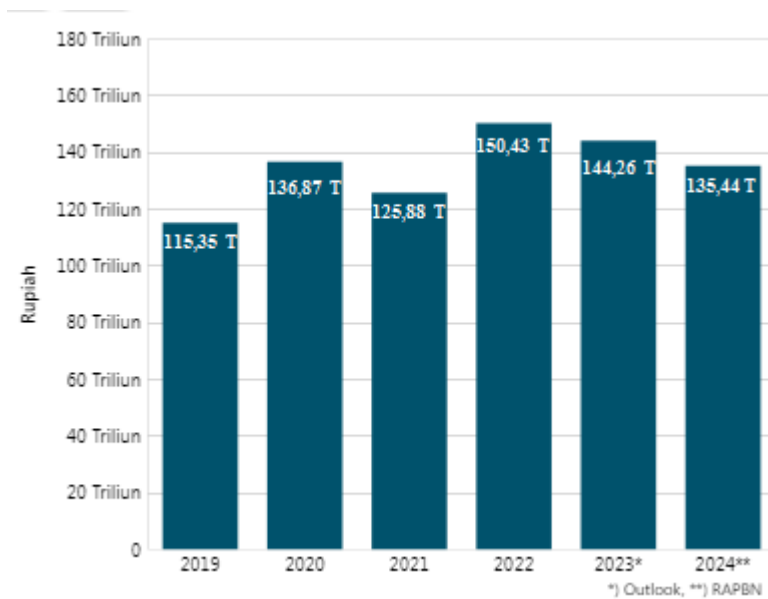
Tren belanja pertahanan Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: Pertumbuhan ekonomi yang positif, Meningkatnya ancaman keamanan nasional dan Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan.

Alokasi anggaran belanja pertahanan Indonesia masih didominasi oleh dukungan manajemen dan modernisasi alutsista. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional.



Gambar 5. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia (2019-2024*
Sumber: (Zahara & Rizky, 2020)

Berdasarkan data SIPRI (2019), anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB pada periode 2009-2018 masih di bawah 1 persen dari PDB, atau masih di bawah rata-rata anggaran pertahanan negara-negara ASEAN. Berdasarkan data BPS, PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar Rp15.833,9 triliun. Artinya, di tahun 2019 alokasi anggaran pertahanan hanya sebesar 0,68 persen terhadap PDB. Dalam Renstra Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2015-2019 disebutkan bahwa terdapat target untuk dapat menaikkan anggaran pertahanan menjadi sebesar 1,5 persen dari PDB. Namun hingga saat ini masih belum dapat tercapai. Anggaran Pertahanan mengalami tren yang meningkat sejak 2018 sebesar Rp106,8 triliun menjadi Rp127,35 triliun di tahun 2020. Saat ini, alokasi terbesar anggaran pertahanan adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 41,6 persen, untuk belanja barang sebesar 32,9 persen dan untuk belanja modal sebesar 25,4 persen. Selama ini, anggaran militer Indonesia sebagian besar tersalurkan pada belanja matra darat. Pada tahun 2019 anggaran militer untuk TNI AD sebesar Rp44,96 miliar, TNI AL sebesar Rp17,44 miliar dan TNI AU sebesar Rp13,76 miliar. Di tahun 2020, anggaran untuk TNI AD sebesar Rp55,92 miliar, TNI AL sebesar Rp22,08 miliar dan TNI AU sebesar Rp15,50 miliar. Kementerian Pertahanan juga mengalokasikan anggaran untuk program modernisasi alutsista pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp10,86 triliun yang terdiri Rp4,59 triliun untuk matra darat, Rp4,16 triliun untuk matra laut dan Rp2,11 triliun untuk matra udara.



Gambar 6. Anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia (2019-2024*)

Sumber : (Annur, 2023)

Gambar 6. menunjukkan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Dalam periode enam tahun tersebut, terlihat variasi signifikan dalam nilai alokasi anggaran yang mencerminkan perubahan prioritas dan kebijakan pemerintah terkait pertahanan nasional. Pada tahun 2019, anggaran pertahanan mencapai Rp115.35 triliun, dan kemudian mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020 menjadi Rp136.87 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana alokasi anggaran mencapai puncaknya sebesar Rp150.43 triliun. Hal ini mungkin mencerminkan tanggapan terhadap dinamika keamanan global, kebijakan strategis, atau kebutuhan mendesak dalam pemodernan alat pertahanan. Meskipun demikian, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan nilai anggaran, mencapai Rp144.27 triliun pada 2023 dan Rp135.45 triliun pada 2024.

Penurunan anggaran tersebut bisa dipahami sebagai hasil dari penyesuaian kebijakan fiskal dan pertimbangan ekonomi nasional. Meskipun demikian, pada tahun 2024, anggaran tetap signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pertahanan nasional meskipun menghadapi tekanan fiskal. Selain itu, pergeseran dalam alokasi anggaran juga memberikan wawasan tentang prioritas pengeluaran Kementerian Pertahanan. Terlihat bahwa dukungan manajemen mendapatkan alokasi terbesar pada tahun 2024, dengan nilai sebesar Rp77.56 triliun, diikuti oleh modernisasi alutsista dan sarpras pertahanan sebesar Rp43.01 triliun. Meskipun terjadi penurunan total anggaran pada tahun 2024, fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional tetap dijaga, mencerminkan kebijakan pemerintah untuk memastikan kesiapan TNI dan keamanan nasional.

Peningkatan tren belanja pertahanan Indonesia merupakan hal yang positif, karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Peningkatan belanja pertahanan tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri.

Namun, perlu diperhatikan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan Indonesia masih didominasi oleh dukungan manajemen dan modernisasi alutsista. Pengembangan industri pertahanan memerlukan lebih dari sekadar dukungan operasional; investasi dalam riset, teknologi, dan infrastruktur juga sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan prioritas yang cukup untuk pengembangan industri pertahanan.

Dalam menghadapi perubahan tren belanja dan dinamika keamanan global, penting bagi pemerintah untuk memiliki kebijakan yang proaktif dalam meningkatkan infrastruktur dasar industri pertahanan dan meningkatkan investasi dalam riset ilmu pengetahuan untuk mendukung kemajuan teknologi alutsista.

Analisis terhadap pembelian alutsista, terutama pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 dari Qatar, perlu dilihat dari perspektif efektivitas dan kesiapan tempur TNI AU. Kendati terdapat rencana upgrade dan overhaul/repair pesawat SU-27/30, Hawk 100/200, dan F-16, pembelian pesawat bekas ini

dijadikan sebagai solusi cepat untuk mengatasi penurunan kesiapan tempur yang disebabkan oleh pesawat yang habis masa pakainya. Sementara langkah-langkah tersebut bisa dijustifikasi dalam konteks kebutuhan mendesak, tetapi perlu dipertimbangkan secara menyeluruh mengingat dampak jangka panjangnya terhadap kemampuan pertahanan nasional.

Pentingnya progres dalam program modernisasi alutsista, seperti pembelian pesawat baru seperti Dassault Rafale dan F-15 Super Eagle, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa alutsista yang dimiliki memiliki kemampuan yang mumpuni. Namun, perlu dipertimbangkan pula kecepatan pengiriman dan kesiapan operasional alutsista baru agar tidak menurunkan tingkat kesiapan tempur secara signifikan.

Dengan adanya alokasi anggaran dan kebijakan pembelian alutsista, kemandirian industri pertahanan masih menjadi tantangan. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi kendala infrastruktur dasar dan peningkatan investasi riset untuk mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di dalam negeri. Dukungan penuh pemerintah, bukan hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan riset, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian yang diinginkan.

Dengan demikian, analisis belanja pertahanan tidak hanya sebatas pada jumlah alokasi anggaran tetapi juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap strategi pengeluaran guna mencapai keberlanjutan dan kemandirian dalam jangka panjang.

Dampak Tren Belanja Pertahanan Terhadap Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, tren belanja pertahanan Indonesia tampaknya tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri¹². Meskipun Kementerian Pertahanan merencanakan alokasi anggaran sebesar 124,99 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,7 kuadriliun untuk pembelian alat pertahanan, belanja sebesar itu ternyata tidak bermakna banyak bagi industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan dunia dan terbatasnya pesanan alutsista dari Pemerintah Indonesia kepada industri pertahanan nasional. Selain itu, kritik semakin tajam karena dana tersebut datang sebagai utang.

Al A'raf, Ketua Centra Initiative dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, menilai bahwa sebagian besar masalah industri pertahanan adalah kurangnya *political will* dari pemerintah. Belanja pertahanan masih banyak berasal dari luar negeri, transfer teknologi yang terbatas, dan industri pertahanan yang tertatih-tatih.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kemandirian industri pertahanan juga diharapkan dapat mewujudkan pergeseran pemahaman dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk masa depan industri pertahanan Indonesia jika ada perubahan dalam pendekatan dan kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka hasil temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Anggaran dan Tren Belanja Pertahanan Indonesia, menunjukkan bahwa tren belanja pertahanan Indonesia mengalami fluktuasi dalam periode 2019-2024. Dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi positif, meningkatnya ancaman keamanan nasional, dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan menunjukkan variasi yang mencerminkan perubahan prioritas dan kebijakan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan 2024, anggaran pertahanan tetap signifikan, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pertahanan nasional meskipun menghadapi tekanan fiskal. Peningkatan tren belanja pertahanan Indonesia memberikan sinyal positif terkait komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa alokasi anggaran masih didominasi oleh dukungan manajemen dan modernisasi alutsista. Pengembangan industri pertahanan memerlukan lebih dari sekadar dukungan operasional; investasi dalam riset, teknologi, dan infrastruktur juga sangat penting. Dalam menghadapi perubahan tren belanja dan dinamika keamanan global,

pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang proaktif untuk meningkatkan infrastruktur dasar industri pertahanan dan meningkatkan investasi dalam riset ilmu pengetahuan.

Dampak Tren Belanja Pertahanan Terhadap Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia, menunjukkan bahwa tren belanja pertahanan belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Meskipun alokasi anggaran besar diarahkan untuk pembelian alat pertahanan, terdapat kritik terhadap kurangnya transfer teknologi, pesanan yang terbatas dari pemerintah, dan dependensi pada impor alutsista. Kemandirian industri pertahanan memerlukan lebih dari sekadar belanja pertahanan; political will dan perubahan dalam pendekatan kebijakan menjadi kunci untuk perkembangan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- (SIPRI)., S. I. P. I. (2020). *SIPRI Databases*. SIPRI.
- Annur, C. M. (2023). Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua di RAPBN 2024, Ini Tren Belanjanya. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/21/anggaran-kemenhan-terbesar-kedua-di-rapbn-2024-ini-tren-belanjanya>
- Budiman, A., A. I. Nugroho, dan M. R. N. (2021). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. XYZ*. Universitas Indonesia.
- Karim, R. I. (2020). *Pengaruh Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia Tahun 2018-2023 di PT Pindad*. Universitas Padjadjaran.
- Muhammad Ridwan, dan A. R. K. (2023). Alarm Sri Mulyani dan Lonjakan Utang di Kementerian Prabowo. *Bisniscom-Logo*. <https://plus.bisnis.com/read/alarm-sri-mulyani-dan-lonjakan-utang-di-kementerian-prabowo>
- Santika, E. F. (2024). Anggaran Kementerian Pertahanan 2024, Terbesar untuk Manajemen. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/04/anggaran-kementerian-pertahanan-2024-terbesar-untuk-manajemen>
- SIPRI. (2020). *The Military Balance 2020*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., & Pratama, F. S. G. (2023). Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue. *Journal of Political Issues*, 4(2), 120–136. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>
- Travis. (2016). *Nutrition and Athletic Performance*. Canada: Medicine. & Science in Sports & Exercise.
- Wibowo, Fx. Pudjo, Gregorius Widiyanto, dan A. R. N. (2019). *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada Perusahaan Tom's Silver Yogyakarta*. Universitas Sanata Dharma.
- Wibowo, S. (2023). *Analisis Siaran Iklan dan Gratis Ongkos Kirim sebagai Tipu Muslihat di Youtube Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Pada E-Commerce Shopee)*. Universitas Telkom.
- Zahara, E. L., & Rizky, A. M. N. (2020). Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia. *Analisis Ringkas Cepat-Puskajianggaran, No.04/arc.*, 1–6.